

**ANALISIS PENUNJUKAN HAKAM DALAM PUTUSAN SELA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SRIYANI
NIM : 2103183

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdri. Sri Yani

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Sri Yani

NIM : 2103183

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul : Analisis Penunjukan *Hakam* dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2008
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Ali Imron, M.Ag
NIP. 150 327 107



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sri Yani
NIM : 2103183
Judul : ANALISIS PENUNJUKAN *HAKAM* DALAM PUTUSAN SELA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang

Semarang, 29 Juli 2008

Sekretaris

Drs. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 150 250 148

Ali Imron, M.Ag
NIP. 150 327 107

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M, Ag
NIP. 150 231 628

Nur Hidayati Setyani, S.H
NIP. 150 260 672

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Ali Imron, M.Ag
NIP. 150 327 107

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

Deklarator,

Sri Yani

ABSTRAK

Hakam merupakan salah satu elemen penting dalam proses penyelesaian masalah perceraian dengan sebab *syiqoq*. Syarat dari *hakam* itu sendiri cakap, jujur, berwibawa, arif, dapat dipercaya dan disegani oleh pihak yang berperkara. Selain itu, *hakam* tidak boleh memihak salah satu pihak. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, tepatnya pada putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm menggambarkan bahwa orang yang diajukan menjadi *hakam* oleh pihak penggugat yakni ayah kandungnya, adalah orang yang memiliki rasa “tidak suka” kepada menantunya. Adanya rasa tidak suka tersebut, tentu akan melahirkan usaha perdamaian yang tidak obyektif, sehingga tidak akan berhasil secara maksimal dalam usaha mendamaikan dan bahkan dapat berbalik menjadi sosok yang mendukung adanya perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Untuk menganalisis data yang sudah didapat, penulis menggunakan metode *diskriptif kualitatif*, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *legal formil* yakni, analisis tersebut akan penulis lakukan dengan membuat perbandingan antara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai hukum formil beracara di Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm bahwa Majelis Hakim kurang maksimal dalam mempergunakan dasar pertimbangan hukum berkaitan dengan penunjukan dan pengangkatan *hakam*, khususnya mengenai kelayakan pihak yang diangkat menjadi *hakam*. Secara hukum formil proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* oleh Majelis Hakim dalam putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari ketiadaan proses pemeriksaan pada calon *hakam* oleh Majelis Hakim serta tidak dituliskannya dasar pertimbangan hokum dalam putusan sela yang dibuat Majelis Hakim untuk mengangkat *hakam*. Berdasarkan adanya ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis putusan sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm cacat dan batal demi hukum.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)¹

¹ Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Karya Utama, 2000, hlm. 549.

PERSEMBAHAN

- ✓ *Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat & Hidayah Kepada saya sehingga Skripsi ini bisa selesai.*
- ✓ *Bapak dan Ibu atas cinta dan kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putri tercinta.*
- ✓ *Kakak-kakakku ,adik-adikku dan Keluarga Besar, yang senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi*
- ✓ *Kepada Bapak Ibu Dosen, Sekjur N kajur AS, Dosen Pembimbing dan Pegawai Kantor Yang telah membimbing saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini,*
- ✓ *Sahabat- sahabat IAIN Semarang –khususnya Fakultas Syaria'h , tak Lupa Konco-konco AS c-03 Yang Aku banggakan & Aku Sayangi dengan Rela memberi bantuan , dorongan & Motivasi*
- ✓ *Mas- mas yang pernah jadi dambaan hati – Shobat Kos Gaul “Mbak Fidah, PincUK Maniz, Munadlirah, Pretty, Zulfa Imoet,dan Keluarga Besar Bapak Purwadi” yang saya Rindukan.*
- ✓ *Dan Alhamdulillah dengan dorongan-Nya saya bisa menyelesaikan Skripsi dengan lancar.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Ayah dan Ibu yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Saudara-saudaraku terima kasih atas semuanya.
8. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku semua.
9. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat ridho-Nya. Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

Sri Yani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	? 1
B. Rumusan Masalah	? 5
C. Tujuan Penelitian	? 6
D. Tinjauan Pustaka	? 6
E. Metode Penelitian	? 9
F. Sistematika Penulisan	?12

BAB II :KETENTUAN UMUM PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN *HAKAM*

A. Pengertian dan dasar Hukum <i>Hakam</i>	?
B. Hukum pengangkatan <i>Hakam</i>	?
C. Kriteria <i>Hakam</i>	?
D. Tugas dan Wewenang <i>Hakam</i>	?
E. Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan <i>Hakam</i>	?

**BAB III : PELANGGARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PP
NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 1997 - 2006**

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara	36
1. Letak Geografis	36
2. Struktur Demografis	37
3. Keadaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan	38
4. Banyaknya Perkara Yang Diputus Pengadilan Menurut Macamnya Pada Tahun 2006.....	39
B. Gambaran Umum Pegawai Negeri Sipil	41
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Jepara Tahun 1997-2006.....	46
D. Alasan dan Akibat Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Jepara Tahun 1997-2006.....	50

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL TERHADAP PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45
TAHUN 1990 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI
KASUS DI KABUPATEN JEPARA) TAHUN 1997 - 2006**

A. Analisis Terhadap Bentuk-bentuk Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang.....	64
--	----

B. Analisis Alasan dan Akibat Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pasal 15 PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Jepara Tahun 1997-2006	70
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Ke -saran	83
B. Penutup	84
C. simpulan	82
Saran	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakam merupakan salah satu elemen penting dalam proses penyelesaian masalah perceraian dengan sebab syiqaq.¹ Secara bahasa *hakam* berarti juru damai, wasit, wakil, hakim, atau juri.² Sedangkan secara istilah dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2), *hakam* yang ditulis dengan kata “hakim” adalah orang yang diangkat sebagai pihak yang mengusahakan perdamaian di antara pihak suami isteri yang berselisih dan mengancam keutuhan rumah tangga mereka.

Tugas dan wewenang *hakam* adalah mengusahakan perdamaian di antara pihak yang berperkar. Akan tetapi tidak seluruh perkara syiqaq memerlukan *hakam*. Syarat perkara syiqaq (perselisihan) yang mengharuskan adanya *hakam* adalah apabila perkara perselisihan tersebut masih ada kemungkinan untuk diperbaiki atau belum membahayakan salah satu pihak. Sedangkan apabila perselisihan telah berlangsung lama dan membahayakan

¹ Selain *hakam*, satu elemen penting lain dalam perkara syiqaq adalah saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor 3 Tahun 2006 mengenai kedudukan saksi dan *hakam* dalam perkara syiqaq.

² Pemaknaan *hakam* sebagai juri atau wasit dapat dilihat dalam M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 96. Pemaknaan *hakam* sebagai juru damai dapat dilihat dalam Zaini Ahmad Noeh (terj), *Peradilan di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Jakarta: Intermasa, 1980, hlm. 212. Sedangkan pemaknaan *hakam* sebagai wakil atau hakim dapat dilihat dalam Slamet Abidin, dkk., *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 189-190; Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985, hlm. 243.

salah satu pihak, maka Majelis yang menyidangkannya dapat langsung mengambil putusan untuk memisahkan atau memutuskan perkawinan pihak yang berperkara.³

Dasar hukum Islam mengenai *hakam* dalam penyelesaian masalah perceraian dengan sebab syiqaq terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Firman Allah di atas menunjukkan bahwasanya dalam menyelesaikan masalah perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangga di dalam sebuah keluarga diperlukan adanya pihak yang bertugas mendamaikan. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan bahwa orang-orang yang dipercaya menjadi *hakam* adalah orang-orang yang berasal dari keluarga pihak-pihak yang berperkara (*min ahlihi* dan *min ahliha*).

Hanya saja, karena ketiadaan keterangan tentang laki-laki atau perempuan yang berhak menjadi *hakam*, maka pada perkembangan hukum Islam, khususnya dalam lingkup fiqih, terjadi perbedaan mengenai siapa yang berhak menjadi *hakam*, wewenang, dan penunjukannya. Perbedaan tersebut

³ Apabila memang dinilai perselisihan tersebut membahayakan salah satu pihak yang berperkara, maka Hakim dapat langsung memutuskannya tanpa mengangkat *hakam*. Lih. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990, hlm. 275-276.

seperti diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagaimana dikutip oleh **Abdul Manan**⁴ yang menyebutkan bahwasanya menurut **Asy-Sarbani**, penunjukan *hakam* harus seizin suami istri masing-masing. Pendapat **Asy-Sarbini** berbeda dengan **Abu Zahrah** yang menyebutkan bahwasanya *hakam* harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak isteri. Sedangkan mengenai wewenang *hakam*, **Abu Zahrah** dan **Ibnu Katsir** berpendapat bahwa *hakam* memiliki wewenang mendamaikan dan apabila tidak dapat mendamaikannya, maka *hakam* berhak untuk menceraikan kedua pihak yang berselisih. Pendapat ini berbeda dengan **Asy-Sarbini** yang menyebutkan bahwa wewenang *hakam* hanya menjadi wakil dari kedua belah pihak yang berselisih dan tidak memiliki hak untuk menceraikan.

Sedangkan secara legal formil hukum perundang-undangan di Indonesia, masalah mengenai siapa yang berhak menjadi *hakam* dan wewenang *hakam* terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi

“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*”⁵

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berwenang menjadi *hakam* adalah keluarga dari masing-masing pihak atau dapat berasal dari orang lain di luar keluarga.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 392.

⁵ UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemilihan *hakam* sebagai orang yang menjadi juru damai memang bukanlah hal yang mudah. Menurut **M. Yahya Harahap**, *hakam* haruslah memiliki kecakapan, kejujuran, kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh pihak yang berperkara.⁶ Sedangkan menurut **Abdul Manan**, *hakam* haruslah orang yang arif, disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat dipercaya.⁷ Untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka Majelis akan dan harus memeriksa terlebih dahulu kapasitas orang yang akan dijadikan *hakam*. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menentukan layak tidaknya seseorang untuk menjadi *hakam*.

Apabila dari pihak keluarga tidak diperoleh *hakam*, maka *hakam* dapat diambil dari luar keluarga pihak yang berperkara. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat lembaga resmi berupa Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) yang disediakan untuk membantu permasalahan *hakam* ketika tidak ada wakil dari keluarga masing-masing pihak yang cakap untuk dijadikan *hakam*.⁸ Hal ini tidak berlebihan karena bisa jadi orang yang ditunjuk menjadi *hakam* memiliki sikap membenci atau tidak suka dengan salah satu pihak (pihak yang dilawan). Apabila hal ini terjadi, maka usaha perdamaian akan berlangsung tidak obyektif sehingga akan

⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 274.

⁷ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 394.

⁸ Lembaga ini berkedudukan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) dan berwenang untuk memberikan nasehat perkawinan kepada pasangan suami-istri yang terlibat perselisihan. Lih. Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 42. Lih. juga A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 96; Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hlm. 69; Mahmud Yusnus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : PT. Hadikarya Agung, 1096, hlm. 114

mempengaruhi proses hukum dari putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama dalam masalah tersebut.

Pada tingkat praktis, fenomena *hakam* yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap saja ditunjuk dan ditetapkan sebagai *hakam* penulis temukan dalam salah satu putusan sela Pengadilan Agama Kota Semarang, tepatnya pada perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm. Pada kasus tersebut, orang yang ditunjuk sebagai *hakam* adalah orang tua dari para pihak yang berperkara. Dinilai dari kedekatan hubungan dengan pihak yang berperkara dan hukum perundang-undangan, hal ini memang sudah sangat wajar dalam perkembangan penyelesaian kasus perceraian. Akan tetapi jika ditilik dari pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak istri, maka akan tampak “keanehan” tersebut.

Pada berita acara perceraian disebutkan bahwa orang yang diajukan menjadi *hakam* oleh pihak penggugat, yakni ayah kandungnya, adalah orang yang memiliki rasa “tidak suka” kepada menantunya.⁹ Adanya rasa tidak suka tersebut, tentu akan melahirkan usaha perdamaian yang tidak obyektif, sehingga tidak akan berhasil secara maksimal dalam usaha mendamaikan dan bahkan dapat berbalik menjadi sosok yang mendukung adanya perceraian (kontra produktif).

Apabila mengacu pada ketentuan atau syarat orang yang berhak menjadi *hakam* maupun tata cara pengangkatan *hakam*, seharusnya *hakam* pihak penggugat (isteri) batal demi hukum karena disinyalir oleh pihak

⁹ Sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat merujuk pada isi SMS dari Penggugat kepada Tergugat. Salinan Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.

tergugat (suami) sebagai pihak yang memaksa tergugat untuk mengajukan surat gugatan. Akan tetapi oleh pihak PA Semarang orang tersebut tetap ditunjuk sebagai *hakam*. Penyelesaian kasus itu sendiri kemudian berakhir dengan perceraian di antara kedua pihak yang berperkara. Penunjukan *hakam* dari keluarga istri (*ahliha*), yakni ayahnya, akan menimbulkan peluang terjadinya perceraian dan jauh dari *ishlah* (perdamaian) karena dalam kasus tersebut, ayah dari istri yang memegang peranan penting dalam usaha perdamaian justru sebagai inisiatif perkara.

Oleh sebab itulah, penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang berupa penelitian ingin meneliti lebih mendalam mengenai penunjukan *hakam* dalam perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm berikut pertimbangan Majelis Hakim dalam menunjuk dan menetapkan *hakam* yang secara syarat sebenarnya belum memenuhi. Penelitian tersebut akan penulis beri judul penelitian **“Analisis Penunjukan Hakam Dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah terdiri dari dua rumusan masalah sebagai acuan “bekerja” sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm?
2. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini bertolak dari “mencari jawaban” rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu :

1. Mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.
2. Mengetahui tinjauan hukum formil terhadap penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa pustaka yang akan dijadikan sebagai bahan tinjauan oleh penulis yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)* karya **Hady Mufaat Ahmad**. Dalam buku ini, khususnya pada pembahasan masalah syiqaq, terdapat pembahasan mengenai *hakam*. Menurut **Hady**, *hakam* dapat diangkat karena adanya percekcoakan secara terus menerus antara suami dan istri. Dalam buku ini juga disinggung sedikit mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di antara pengikut-pengikut **Imam Hambali**, **Imam Syafi’i**, dan **Imam Abu Hanifah** yang sebagian berpendapat bahwa *hakam* berasal dan diangkat oleh pihak suami-istri dan sebagian lainnya berpendapat bahwa *hakam* ditunjuk dan diangkat oleh hakim atau pemerintah. Sedangkan dalam analisisnya, **Hady** menjelaskan bahwa pengangkatan *hakam* tersebut dapat ditempuh dengan dua jalan. *Pertama*, apabila perkara sudah dilaporkan kepada hakim, maka yang berhak mengangkat *hakam* adalah hakim. *Kedua*, apabila perkara tersebut

belum dilaporkan kepada hakim, maka yang berhak mengangkat *hakam* adalah keluarga suami dan istri yang berselisih. Dan jika kedua *hakam* yang telah ditunjuk, baik dari pihak keluarga maupun oleh hakim tidak dapat mendamaikan suami-istri yang berselisih, maka hakim berhak menceraikan pasangan suami-istri tersebut.

Perundang-undangan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* dan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989* di mana di dalamnya terdapat pasal yang berkaitan dengan permasalahan syiqaq dan pengangkatan *hakam* (Pasal 76 ayat {1} dan {2}). Meskipun tidak terdapat pembahasan yang mendetail, sumber referensi ini sangat penulis anggap penting karena menjadi sumber pijakan hukum dalam kasus ini. Jadi, sumber referensi ini lebih cenderung sebagai pedoman dan pijakan hukum dari pengangkatan *hakam*.

Buku karya **Abdul Manan** yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Masalah *hakam* yang dibahas dalam buku ini di antaranya adalah tentang proses pengangkatan *hakam*. Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai syiqaq dan kedudukan keluarga dalam masalah syiqaq.

Buku yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)* karya **M. Yahya Harahap**. Masalah yang berkaitan dengan pengertian *hakam*, saat pengangkatan *hakam*, tata cara pengangkatan *hakam*, sifat-sifat pengangkatan *hakam*, serta kedudukan

pendapat *hakam* sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjadi pembahasan dalam buku ini.

Di antara buku-buku di atas, dapat diketahui bahwa ada perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Secara substansi, memang ada kemiripan di mana pustaka-pustaka di atas memiliki pembahasan masalah *hakam*. Akan tetapi, dari sudut pandang lokasi dan kasus yang diteliti, maka ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Penelitian ini lebih menekankan pada proses pemilihan dan penetapan hakam dalam praktek peradilan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis semakin merasa yakin untuk melaksanakan penelitian di PA Semarang terkait dengan penunjukan *hakam* dalam penyelesaian masalah perceraian, khususnya pada putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Smg.

E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan proses pelaksanaan penelitian, maka penulis akan memilih dan menerapkan metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian lapangan di mana data yang akan penulis kumpulkan nantinya berbentuk data lisan (hasil wawancara) dan data berbentuk arsip (hasil dari dokumentasi). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam, di mana acuan analisis yang akan dilakukan adalah berpijak pada

ketentuan hukum Islam mengenai penyelesaian masalah perceraian, khususnya masalah yang berkaitan dengan penunjukan *hakam*.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah obyek yang terdapat dalam perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm yang meliputi Majelis Hakim, Hakam, dan Panitera. Dalam penelitian ini, penulis tidak mengambil seluruh populasi melainkan menggunakan sistem sampel. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.¹¹ Oleh sebab itulah sampel dalam penelitian ini hanya meliputi Majelis Hakim dan Panitera.

3. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berhubungan dengan pemilihan, penetapan, dan pengangkatan hakam dalam penyelesaian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 118-119.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 120.

¹² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.

perceraian dengan nomor putusan 1191/Pdt.G/2006/PA.Smg. Secara jelasnya, data-data tersebut meliputi:

- 1) Identitas *hakam* yang penulis dapatkan dalam salinan Putusan Sela
- 2) Hubungan *hakam* dengan pihak penggugat dan tergugat yang penulis dapatkan dalam salinan Putusan Sela
- 3) Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menunjuk dan menetapkan *hakam* yang penulis dapatkan dari proses wawancara

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar obyek penelitian.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Profil Pengadilan Agama Semarang.
- 2) Teori berkaitan dengan penunjukan *hakam*.

Data-data sekunder di atas akan penulis uraikan pada Bab II dan Bab III dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Data yang berkaitan dengan teori *hakam* akan penulis uraikan pada Bab II sebagai landasan teori.
- 2) Data yang berkaitan dengan profil PA Semarang akan penulis uraikan pada Bab III.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

4. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (*person*) dan kertas/tulisan (*paper*) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁴ Obyek dan tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pegawai PA Semarang, yakni pegawai tata usaha
- 2) Majelis Hakim yang dalam penelitian ini diwakilkan kepada Ketua Hakim, yakni Bapak Sarwohadi

Seluruh data hasil wawancara, setelah melalui proses editing, akan penulis uraikan pada Bab III.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip,

¹⁴ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁵ Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang berbentuk dokumen dengan obyek:

- 1) Profil PA Semarang
- 2) Salinan Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 3) Buku-buku yang mengkaji tentang penunjukan dan pengangkatan *hakam*

Data-data sekunder di atas akan penulis uraikan pada Bab II dan Bab III dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Data yang berkaitan dengan teori *hakam* akan penulis uraikan pada Bab II sebagai landasan teori.
- 2) Data yang berkaitan dengan profil PA Semarang akan penulis uraikan pada Bab III.

5. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut **Lexy J. Moleong** proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁶ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan

¹⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁷ Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah. Proses analisis penulis laksanakan dengan menggunakan pendekatan legal formil, yakni analisis tersebut akan penulis lakukan dengan membuat perbandingan antara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai hukum formil beracara di Pengadilan Agama. Hasil analisa tersebut akan penulis uraikan pada Bab IV.

F. Sistematika Penulisan

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya akan penulis rangkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri dari tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian Awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian Isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut :

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Kedudukan *Hakam* dalam Penyelesaian Syiqaq yang meliputi: Pengertian dan Kewenangan *Hakam*, Dasar Hukum *Hakam*, Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam*, dan Kedudukan Pendapat *Hakam* dalam Persidangan.
- Bab III : Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm yang meliputi:
 Profil PA Semarang yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Sejarah Perkembangan PA Semarang, Visi dan Misi PA Semarang, Struktur Organisasi PA Semarang.
 Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm yang meliputi: Proses Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm
- Bab IV : Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm dan Analisis terhadap Penunjukan

dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.

Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup

Bagian Akhir yang tersusun dari Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.
- As-Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990.
- Mahmud Yusnus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : PT. Hadikarya Agung, 1096.
- Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Smg.*
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

BAB II

KEDUDUKAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN SYIQAQ

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Hakam*

Kata *hakam* merupakan saduran dari bahasa arab *hakama* yang memiliki arti juru damai, wasit, wakil, hakim, atau juri.¹ Secara istilah, menurut Kamus Istilah Fiqih,² *hakam* adalah orang yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Pada masalah nikah, *hakam* diartikan sebagai orang yang diserahi tugas untuk menyelesaikan pertengkaran antara suami dan istri. Slamet Abidin, dkk.,³ menjelaskan bahwa *hakam/hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak (suami-istri) apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami-istri tersebut. Sedangkan menurut Yahya Harahap⁴ dengan berdasarkan pada Pasal 76 ayat (2) mendefinisikan *hakam* sebagai orang yang

¹ Pemaknaan *hakam* sebagai juri atau wasit dapat dilihat dalam M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 96. Pemaknaan *hakam* sebagai juru damai dapat dilihat dalam Zaini Ahmad Noeh (terj), *Peradilan di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Jakarta: Intermasa, 1980, hlm. 212. Sedangkan pemaknaan *hakam* sebagai wakil adalah pengertian yang diberikan oleh kelompok ulama yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hanbali, qaul qadim Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat dari Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hanbali, qaul jadid Imam Syafi'i yang mengartikan *hakam* sebagai hakim. Perbedaan ini dapat dilihat dalam Slamet Abidin, dkk., *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 189-190. Penjelasan mengenai arti *hakam* sebagai hakim juga dinyatakan oleh Morteza Mutahhari dengan menggunakan istilah yang berbeda yakni menyinonimkan *hakam* dengan arbiter. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985, hlm. 243.

² M. Abdul Mujieb, dkk., *loc. cit.*

³ Slamet Abidin, dkk., *op. cit.*, hlm. 189.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990, hlm. 270.

ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami atau keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Hakam mempunyai peranan yang strategis dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Adapun yang menjadi dasar hukum pengangkatan *hakam* ada dua, yakni:

Dasar hukum yang pertama adalah surat an-Nisa' ayat 35 yakni

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵

Dasar hukum kedua adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2) Jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*”

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123.

B. Hukum Pengangkatan *Hakam*

Kalimat “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya” (terjemah Q.S an-Nisa’: 35) mengandung maksud bahwa hukum pengangkatan *hakam* merupakan anjuran, yakni apabila dirasa ada kekhawatiran telah terjadi perselisihan di antara suami-istri, maka *hakam* dapat ditunjuk dan diberi tugas dan wewenang untuk mengadakan perbaikan (*islah*).

Pemaknaan tentang hukum penunjukan *hakam* dalam ayat tersebut, di kalangan ulama telah menimbulkan perbedaan pendapat. Pada satu sisi, para ulama berpendapat bahwa hukum pengangkatan *hakam* adalah wajib. Alasan pemberian hukum wajib adalah bahwasanya pengiriman *hakam* termasuk salah satu usaha untuk memerangi kezaliman yang terjadi di antara suami-istri yang bertikai dan untuk menghindarkan permusuhan yang dapat mengancam keamanan hidup salah satu dan atau kedua belah pihak. Ulama yang menganggap hukum pengangkatan *hakam* adalah wajib di antaranya adalah **Imam Syafi’i, Rasyid Ridla, dan Mahmud Syaltut**. Sedangkan di sisi lain, ulama berpendapat bahwa hukum pengangkatan *hakam* adalah sunnah (tidak wajib) dengan tokohnya adalah **Ibnu Rusyd**.⁶

Dalam lingkup hukum perundang-undangan di Indonesia, pengangkatan *hakam* lebih bersifat insidentil (hanya saat diperlukan saja).

⁶ Pendapat Imam Syafi’i dan Mahmud Syaltut dapat dilihat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1708-1709. Mengenai pendapat Ibnu Rusyd tertuang dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 391. Sedangkan tentang pendapat Rasyid Ridla lihat dalam M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 275.

Sifat ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwasanya hukum pengangkatan *hakam* dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sunnah.

Menurut penulis, perbedaan tentang status hukum pengangkatan *hakam* yang terjadi di kalangan ulama bukan berarti telah terjadi perpecahan pemikiran mengenai hukum Islam melainkan merupakan sebuah jalan untuk memandang perlu tidaknya *hakam*. Jika dikaji dari konteks substansi nash al-Qur'an, maka pengangkatan *hakam* memang dapat berujung pada dua hukum, yakni wajib dan sunnah. Menurut penulis, pengangkatan *hakam* dikenakan hukum wajib manakala memang dipandang bahwa kedua pihak yang bersengketa masih memiliki peluang besar untuk berdamai sehingga sangat dibutuhkan pihak-pihak yang dapat memberikan nasehat dan saran kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan dengan perdamaian. Namun apabila dirasa persengketaan telah berlangsung sengit dan salah satu pihak telah mengalami dampak negatif (baik fisik maupun psikis) dari persengketaan tersebut, maka hakim boleh memilih untuk mengangkat *hakam* sebelum memberikan putusan akhir atau tidak mengangkat *hakam* dan langsung memberikan putusan akhir demi kebaikan kedua belah pihak yang bertikai.

Selain berbeda pendapat mengenai hukum pengangkatan *hakam*, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pihak yang memiliki hak untuk memilih, menetapkan, dan atau mengangkat *hakam*. Pada satu sisi, **Mazhab Hanafi**, *qaul qadim* Imam Syafi'i, sebagian pengikut **Hanbali**, dan **at-**

Tabrari⁷ menyatakan bahwa yang berhak mengangkat *hakam* adalah keluarga dari pihak yang berselisih. Sedangkan pada sisi lain, **Mazhab Maliki**, sebagian pengikut **Hanbali**, *qaul jadid* Imam Syafi'i, asy-Sya'bi, dan **Ibnu Abbas** menyatakan bahwa yang berhak mengangkat *hakam* adalah pemerintah melalui wakilnya di peradilan (hakim).⁸

Berkaitan dengan beda pendapat di atas, **Mahmud Syaltut** memberikan jalan tengah dengan menyatakan bahwasanya *hakam* merupakan *wajib 'ain* bagi keluarga, namun jika *hakam* yang ditunjuk oleh keluarga tersebut tidak dapat merukunkan pasangan (suami-istri) yang berselisih maka Pengadilan dapat mengangkat *hakam*.

Sedangkan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, pengangkatan *hakam* diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang menjelaskan kewenangan Pengadilan untuk mengangkat *hakam* setelah mendengar saksi-saksi dalam perkara *syiqaq*.

C. Kriteria *Hakam*

Hakam berdasarkan pada ayat 35 surat an-Nisa merupakan perwakilan dari pihak suami dan pihak istri. Sedangkan pada permasalahan *syiqaq*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kriteria orang yang berhak menjadi *hakam*. Menurut **Syihabuddin Mahmud al-Alusi**, *hakam*

⁷ At-Tabrari adalah seorang mufasir dari kalangan Syi'ah yang umumnya berbeda pendapat dengan kelompok Sunni. Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1709.

⁸ Perbedaan ini dibahas dalam Slamet Abidin, dkk., *op. cit.*, hlm. 190; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

boleh diambil dari luar keluarga pihak yang berselisih karena hubungan kekerabatan bukan merupakan syarat sah. Hal ini didasarkan pada tujuan utama penunjukan *hakam* adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun demikian, pada sisi lain, **Syihabuddin Mahmud** menyebutkan bahwa *hakam* dari keluarga lebih dianjurkan, tetapi bukan berarti suatu keharusan.⁹ Pendapat ini sejalan dengan pendapat **Asy-Syarbani** yang secara lebih detail menyebutkan bahwa *hakam* berasal dari pihak suami-istri dan harus mendapatkan izin dari keduanya.¹⁰ Selain itu, pendapat kedua tokoh tersebut juga menjadi landasan terhadap penerapan kriteria *hakam* di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang memperbolehkan *hakam* dari pihak di luar keluarga.

Di lain pihak, **Abu Kasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari** menyatakan bahwa *hakam* harus berasal dari keluarga masing-masing pihak yang berselisih. Pendapat ini didasarkan pada empat alasan, yakni:

1. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami-istri secara mendalam dan mendekati kebenaran
2. Keluarga kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat menginginkan perdamaian kedua belah pihak
3. Merekalah yang lebih dipercaya oleh suami-istri

⁹ Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1708-1709.

¹⁰ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 392. Perbedaan pendapat mengenai pihak yang berhak menjadi dan mengangkat *hakam* juga dapat dilihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 625; Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 220.

4. Suami-istri yang berselisih akan lebih leluasa dan terbuka dalam bercerita kepada keluarga sendiri.¹¹

Selain kriteria yang didasarkan pada asal dan atau hubungan kekeluargaan, beberapa tokoh Islam juga menyertakan syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi *hakam*. **M. Yahya Harahap**¹² menyebutkan bahwa *hakam* haruslah memiliki syarat-syarat:

1. Kecakapan
2. Kejujuran
3. Kapasitas sebagai juru damai
4. Berwibawa dan disegani oleh pihak yang berperkara.

Menurut **Abdul Manan**,¹³ syarat *hakam* meliputi:

1. *Hakam* haruslah orang yang arif
2. Disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa
3. Dapat dipercaya.

Dua pendapat di atas juga hampir selaras dengan pendapat **Slamet Abidin** yang menyatakan bahwa *hakam* harus memenuhi syarat-syarat:

1. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara
2. Mengadakan perdamaian dengan ikhlas
3. Disegani kedua belah pihak (suami istri)
4. Berpihak kepada yang teraniaya jika pihak lain tidak mau berdamai¹⁴

¹¹ Ensiklopedia Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1709.

¹² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 274.

¹³ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 394.

¹⁴ Slamet Abidin, dkk., *op. cit.*, hlm. 193.

Sedangkan **Sayyid Sabiq**, sebagaimana dikutip dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,¹⁵ menyebutkan bahwa syarat *hakam* adalah:

1. Berakal
2. Baligh
3. Adil
4. Muslim.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya seseorang yang akan diangkat dan atau ditetapkan menjadi *hakam* (paling tidak) harus memenuhi syarat-syarat:

1. Baligh
2. Berakal
3. Adil
4. Arif
5. Disegani oleh kedua belah pihak (suami istri)
6. Berniat melakukan perdamaian dengan ikhlas
7. Muslim

D. Tugas dan Wewenang *Hakam*

Perbedaan pendapat di kalangan pemikir Islam, khususnya di kalangan ulama mazhab, juga terjadi dalam hal tugas dan wewenang *hakam*. Kelompok **Mazhab Hanafi**, *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i, **Mazhab Hanbali**, **al-Hasan Basri**, dan **Qatadah** menyatakan bahwasanya tugas dan wewenang *hakam*, baik dari pihak suami maupun istri, adalah hanya mendamaikan dan tidak

¹⁵ Ensiklopedia Hukum Islam, *loc. cit.*

memiliki hak untuk menceraikan kedua pihak yang berselisih. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwasanya *hakam* adalah wakil dari suami-istri, dan mereka hanya berhak mengambil keputusan untuk menceraikan kedua pihak apabila mereka telah mendapatkan izin dari suami dan istri yang berselisih.

Sedangkan kelompok lain yang terdiri dari **asy-Sya'bi, Ibnu Abbas, Mazhab Maliki**, dan *qaul jadid* Imam Syafi'i menyatakan bahwa *hakam* berwenang untuk memutuskan perkawinan suami-istri yang berselisih apabila telah tidak dapat didamaikan meskipun sekalipun tanpa izin dari suami-istri. Wewenang tersebut diperbolehkan apabila kedua *hakam* telah menemukan kesepakatan di antara keduanya, namun jika belum terdapat kesepakatan, maka *hakam* tidak berhak memutuskan perkawinan hingga tercapai kesepakatan.¹⁶

Perbedaan pendapat di atas bukan lantas diartikan bahwa ada perpecahan hukum dalam Islam berkaitan dengan *hakam*. Kedua pendapat tersebut merupakan satu kesatuan yang dapat menjadi wakil dari fleksibilitas hukum Islam. Dengan mendasarkan pada surat an-Nisa' ayat 35, bahwa kedua pendapat tersebut dapat diterapkan secara bersamaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila telah mendapatkan izin dari pihak suami istri dan belum sampai kepada *qadi* (pengadilan), maka *hakam* dapat memutuskan tentang hasil usaha perdamaannya; cerai atau damai.

¹⁶ *Ibid.*

2. Apabila telah sampai kepada *qadi* (pengadilan) duduk perkara antara suami-istri yang bertikai, maka *hakam* yang ditunjuk dan diangkat hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya dan mengenai hasilnya diserahkan kepada *qadi* (pengadilan).
3. Apabila di wilayah suami-istri tidak terdapat *qadi* (pengadilan), maka *hakam* yang ditunjuk dapat memutuskan hasil usaha perdamaian meskipun belum dan ataupun tidak mendapat persetujuan dari suami-istri.

Prinsip fleksibilitas yang terkandung dalam masalah tugas dan wewenang *hakam* juga pernah dijalankan dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Sebelum tahun 1930-an, kebanyakan ulama Indonesia dan para pejabat di lingkungan agama (Islam) berpegang pada pendapat lama (*qaul qadim*) **Imam Syafi'i** yang menyatakan bahwa *hakam* adalah wakil dari kedua belah pihak yang hanya berwenang pada pemberian nasehat semata dan tidak mengikat suami istri untuk menentukan putus atau tidaknya sebuah perkawinan. Kemudian pada akhir dekade 30-an, di mana banyak wanita yang lebih memilih *riddah* (murtad) sebagai alasan cerai dan didukung dengan terbentuknya Perhimpunan Pengheloeh Dan Pegawainya (PPDP) pada tahun 1938, maka pada tahun 1940 *hakam* yang ditunjuk dalam upaya perdamaian diberikan tugas dan wewenang yang lebih luas, yakni berhak memutuskan perkawinan (*talak* maupun *khulu'*) walaupun tanpa persetujuan suami.¹⁷

Saat ini, setelah terbitnya undang-undang perkawinan yang disahkan pada tahun 1974 serta dikuatkan dengan undang-undang tentang Peradilan

¹⁷ Keterangan mengenai sejarah perkembangan tugas dan wewenang *hakam* di Indonesia pada tahun 1930-1940 dapat dibaca secara lebih jelas dalam Zaini Ahmad Noeh (terj), *op. cit.*, hlm. 212-214.

Agama pada tahun 1989 dan diikuti dengan undang-undang perubahan tentang undang-undang Peradilan Agama tahun 2006, tugas dan wewenang *hakam* adalah hanya sebatas pada proses mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak (suami-istri) yang bersengketa dan pihak yang memiliki hak untuk memutuskan mengenai status perkawinan pihak yang bersengketa adalah Pengadilan Agama.

E. Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam*

Penjelasan mengenai tata cara penunjukan dan pengangkatan *hakam* dapat dijelaskan dalam tiga kelompok penjelasan (nash al-Qur'an, pendapat ulama, dan peraturan perundang-undangan Indonesia) sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nash al-Qur'an

Penunjukan dan pengangkatan *hakam* berdasarkan nash al-Qur'an dapat didasarkan pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan ketentuan tentang penunjukan dan pengangkatan *hakam*. Penunjukan dan pengangkatan *hakam* sebagaimana tertuang dalam firman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Waktu penunjukan dan pengangkatan *hakam*.

Dijelaskan bahwa seseorang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai *hakam* manakala terjadi perselisihan di antara suami istri. Jadi apabila tidak atau belum terjadi sengketa di antara suami istri, maka tidak perlu adanya *hakam*. Kalimat “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya” (terjemah Q.S an-Nisa': 35), secara

tidak langsung memberikan sinyalemen bahwasanya ayat tersebut juga mengandung batasan persengketaan.

Menurut penulis, batasan kebolehan penunjukan dan pengangkatan *hakam* adalah manakala ada rasa kekhawatiran dari pihak di luar suami-istri yang bersengketa jika terjadi sesuatu hal yang merugikan dan bahkan mengancam keamanan kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri).

b. Pihak-pihak yang berhak menjadi dan mengangkat *hakam*

Pihak-pihak yang berhak menjadi dan mengangkat *hakam* adalah keluarga dari pihak suami dan pihak istri (*min ahlihi wa ahliha*). Kalimat *min ahlihi wa ahliha* ini sekaligus menjadi penegas bahwasanya pihak yang diperbolehkan Islam, secara nash al-Qur'an, adalah dari keluarga suami-istri yang sedang bersengketa.

Pembatasan mengenai pihak yang berhak menjadi dan mengangkat *hakam* dari pihak keluarga suami-istri yang bersengketa, menurut penulis, lebih berdasar pada prinsip Islam mengenai aib manusia. Dalam ajaran Islam, aib seseorang tidaklah boleh dibebarkan untuk diketahui khalayak umum. Oleh sebab itulah, Islam memberikan batasan kepada keluarga suami-istri yang bersengketa tidak lain adalah untuk menjaga nama baik dari pihak yang bersengketa. Selain itu, pembatasan ini juga mengindikasikan anggapan bahwa keluarga dari pihak yang bersengketa lebih mengetahui duduk perkara serta memiliki kedekatan hubungan emosional sehingga dipandang akan

dapat mempermudah dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara suami-istri.

c. Tugas dan Wewenang *Hakam*

Berkaitan dengan tugas dan wewenang *hakam* menurut nash al-Qur'an terdapat dalam kalimat يُرِيدَا إِصْلَاحًا (mengadakan perbaikan).

Kalimat tersebut memang belum memiliki kepastian tentang tugas dan wewenang *hakam*. Akibatnya banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. Akan tetapi menurut penulis, belum adanya kepastian tugas dan wewenang *hakam* – terkait dengan tugas dan wewenang mendamaikan dan menceraikan – merupakan salah satu wujud universalitas dari ajaran agama Islam. Dengan ketiadaan kepastian mengenai tugas dan wewenang *hakam*, dan hanya ditulis dengan kalimat “mengadakan perbaikan”, maka umat Islam dapat memposisikan tugas dan wewenang *hakam* sesuai dengan keadaan peradilan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Jadi tugas dan wewenang *hakam* dalam al-Qur'an yang berpijak pada tugas “mengadakan perbaikan” menurut penulis dapat diberikan makna ganda. *Pertama*, “perbaikan” dalam konteks perdamaian yang mana pada tugas ini *hakam* hanya memiliki tugas dan wewenang mendamaikan suami-istri yang bersengketa. *Kedua*, “perbaikan” dalam konteks menceraikan di mana apabila usaha perdamaian yang dilakukan oleh *hakam* kedua belah pihak tidak berhasil, maka yang terbaik dalam upaya perbaikan adalah

menceraikan suami-istri yang bersengketa. Perceraian bukan berarti suatu hal yang buruk. Bisa jadi jika persengketaan tidak berhasil didamaikan tetapi suami-istri tetap dipaksakan hidup bersama akan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Terlebih lagi, dengan adanya perceraian peluang suami-istri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik akan terbuka.

Dari keterangan di atas dapat diperoleh bahwasanya proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* menurut nash al-Qur'an dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Apabila dianggap telah terjadi persengketaan antara suami-istri, maka pihak keluarga dianjurkan untuk mengirim seorang *hakam* dari keluarga yang bertikai masing-masing satu orang.
- b. Setelah ditunjuk, *hakamain* bertugas untuk melakukan perbaikan yang diawali dengan usaha perdamaian. Berkaitan dengan lama waktu yang digunakan tidak diberikan batasan dalam nash al-Qur'an.
- c. Apabila tidak berhasil, maka *hakamain* berunding untuk menentukan perbaikan lainnya (perceraian). Hal ini dilakukan dengan syarat telah menjadi kesepakatan *hakamain* dan mendapat persetujuan dari suami-istri yang bersengketa.

2. Pendapat Ulama

Pendapat ulama tentang penunjukan dan pengangkatan *hakam*, menurut penulis, merupakan wujud pelaksanaan surat an-Nisa' ayat 35. Berkaitan dengan waktu penunjukan dan pengangkatan *hakamain*, di

kalangan ulama' sepakat bahwasanya *hakam* merupakan konsekuensi dari *syiqaq* sehingga saat penunjukan dan pengangkatan *hakam* adalah pada saat terjadi persengketaan di antara suami-istri. Jika telah dipandang terjadi persengketaan, maka *hakam* perlu dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah melakukan usaha perdamaian, maka pihak yang ditunjuk sebagai *hakam* dapat mengambil keputusan tentang usaha yang telah dilakukannya. Mengenai keputusan *hakam*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama di mana pada satu kelompok sepakat bahwa *hakam* hanya bertugas mendamaikan dan tidak berwenang untuk menceraikan, tetapi di sisi lain ulama berpendapat bahwa *hakam* bertugas mendamaikan dan apabila tidak tercapai perdamaian, maka *hakam* berwenang untuk menceraikan suami-istri yang bersengketa.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* di kalangan pendapat ulama memiliki kesamaan dengan apa yang termaktub dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 35.

3. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

¹⁸ Kelompok yang bersepakat bahwa tugas *hakam* hanyalah mendamaikan di antara suami-istri yang bersengketa dan tidak memiliki hak untuk menceraikan atau memutuskan perkawinan mereka adalah kelompok Mazhab Hanafi, *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i, Mazhab Hanbali, al-Hasan Basri, dan Qatadah sedangkan kelompok yang berpandangan bahwa tugas dan wewenang *hakam* hingga tahap memutuskan perkawinan adalah asy-Sya'bi, Ibnu Abbas, Mazhab Maliki, dan *qaul jadid* Imam Syafi'i. Lihat Ensiklopedia Hukum Islam, *loc. cit*; Mengenai perbedaan pendapat tersebut juga dijelaskan dalam Hady Mufaat Ahmad, *loc. cit*; Slamet Abidin, dkk., *op. cit.*, hlm. 190.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang *hakam* pada dasarnya berpijak pada surat an-Nisa' ayat 35. Akan tetapi pada penerapannya terjadi perpaduan antara substansi dalam ayat tersebut dengan pendapat para ulama. Wujud dari penyatuan kedua sumber tersebut tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi

“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”

Sedangkan proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan dan pengangkatan *hakam* dilaksanakan setelah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami-istri) yang berselisih.¹⁹
- b. Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut dan dipandang masih berpeluang untuk didamaikan, maka Hakim berhak meminta kepada pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang untuk menjadi *hakam*, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarganya.²⁰
- c. *Hakam* yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih harus disertai dengan biodata dan keterangan mengenai diri *hakam*. Hakim kemudian memeriksa kelayakan diri dari *hakam* yang telah ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Namun apabila Hakim merasa bahwa *hakam* tidak

¹⁹ Dijelaskan dalam M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 273.

²⁰ Dijelaskan dalam *Ibid.*, hlm. 274. Lihat juga dalam Abdul Manan, *op. cit.*, hlm.

layak, maka pihak yang berselisih harus menunjuk lagi *hakam* dari pihaknya. Apabila tetap tidak layak dan dianggap bahwa tidak ada *hakam* dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berselisih, maka Hakim dapat menunjuk *hakam* dari luar pihak keluarga yang berselisih. Pengangkatan *hakam* oleh Hakim dikuatkan dengan Putusan Sela. Dalam Putusan Sela juga dicantumkan lama waktu yang diberikan kepada *hakam* untuk mengusahakan perdamaian.²¹

F. Kedudukan Pendapat *Hakam* dalam Persidangan

Setelah melakukan usaha perdamaian, maka hasil dari usaha tersebut kemudian dipaparkan dalam persidangan. Penjelasan mengenai usaha perdamaian dari para *hakam* tidak lantas langsung dijadikan putusan oleh Hakim. Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa laporan hasil usaha perdamaian para *hakam* dan kemudian dengan berbagai pertimbangan baru dapat memberikan putusan akhir mengenai perkara syiqaq yang tengah terjadi.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendapat *hakam* dalam persidangan bukanlah pijakan mutlak bagi Hakim untuk mengambil dan menetapkan putusan akhir dari perkara syiqaq. Hal ini tidak lain karena adanya penerapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwasanya yang memiliki wewenang untuk menimbang dan memberikan

²¹ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 274-275. Dalam hal ini, jika pihak yang bersengketa tidak memiliki *hakam* yang layak, maka Pengadilan Agama dapat melibatkan BP-4 untuk membantu menyediakan *hakam*. Lihat. Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 42.

²² Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 276-277.

putusan dalam perkara perkawinan adalah Pengadilan Agama yang diwakili oleh Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan.

BAB III

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN *HAKAM* DALAM PUTUSAN SELA PERKARA NOMOR 1191/PDT.G/2006/PA.SM

A. Profil Pengadilan Agama (PA) Semarang

Pengadilan Kota Semarang termasuk kelompok Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura yang mana keberadaannya sudah ada sebelum adanya Departemen Agama.¹ Kedudukan atau kantor dari Pengadilan Agama Kota Semarang awalnya bertempat di serambi Masjid Kauman Kota Semarang.²

Sejak tanggal 17 Agustus 1978 sampai sekarang, Pengadilan Agama Kota Semarang bertempat di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang Barat. Semenjak berdirinya hingga sekarang, di lingkungan PA Kota Semarang sudah terjadi pergantian ketua sebanyak 11 kali. Susunan Peradilan Agama Semarang kelas 1 A, tentang tugas dan wewenangnya serta susunan organisasi

¹ Karena masuk kelompok peradilan Pulau Jawa dan Madura, maka disebut dengan nama *Reesteraad* atau *Raad* Agama. Bukti dari keberadaan Pengadilan Kota Semarang adalah dengan ditemukannya arsip tentang putusan bernomor 30 tahun 1891.

² Terbentuknya Pengadilan Agama di Kota Semarang (Pulau Jawa) tidak lepas dari Sultan Agung, Raja Mataram, yang meletakkan dasar Islam sebagai dasar hukum untuk mengadili suatu perkara. Pada saat itu, Pengadilan yang didirikan oleh Sultan Agung dikenal dengan Peradilan Serambi yang mana banyak melibatkan kelompok ulama Islam dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dan ditetapkan. Kemudian pada saat Amangkurat I berkuasa menggantikan Sultan Agung, Peradilan Serambi yang didirikan oleh Sultan Agung diganti dengan Peradilan Perdata yang berdampak berkurangnya peranan ulama dalam proses peradilan. Pada tahun 1747 daerah Semarang jatuh ke tangan kompeni (Belanda), dan hukum yang dipakai ialah undang-undang orang Jawa dengan catatan dapat diterima oleh masyarakat. Pada saat yang berkuasa adalah Pakubuwono ke II, dikeluarkan plakat yang berisi tentang pengambilalihan perkara-perkara yang dulu diadili oleh pengadilan *landraat* pada tahun 1750. Dengan demikian, maka *landraat* itu menggantikan kedudukan pengadilan perdata dulu yang di zaman Sultan Agung adalah Peradilan Serambi. Pada pokoknya peraturan plakat itu adalah lanjutan dari pengadilan di Mataram, dengan pengertian bahwa *landraat* di Semarang menggantikan Pengadilan Serambi sepanjang daerah kekuasaan kompeni. Hal dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Dewi, Panitera PA Semarang, tanggal 3 Juni 2008.

dan tata kerjasama dengan peradilan yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 11. Tahun 1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama di daerah dan disempurnakan dengan adanya Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1989 Bab II tentang susunan Pengadilan Agama, disempurnakan lagi dengan keputusan Menteri Agama KMA/393/1990, Keputusan Mahkamah Agung KMA/003/SK/11/1992, dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989. berikut ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Semarang.

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelaskan oleh undang-undang dan literatur pada umumnya.

a. Tugas Pengadilan Agama Semarang

Menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf, zakat, dan shadaqah.³ Setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989, dalam pasal 49, tugas Pengadilan Agama

³ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, Cet-11, hlm. 1.

mengalami perubahan yakni Pengadilan Agama bertugas memeriksa memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kekuasaan relatif atau kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada berdiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴

Kompetensi relatif diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan Di Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini ada pengecualian yang berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.

Kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Kota Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Gayamsari
- 2) Kecamatan Candisari
- 3) Kecamatan Gajahmungkur
- 4) Kecamatan Pedurungan

⁴ Raikhan Rashid, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada 2001, hlm 25.

- 5) Kecamatan Tembalang
- 6) Kecamatan Banyumanik
- 7) Kecamatan Semarang Tengah
- 8) Kecamatan Semarang Timur
- 9) Kecamatan Semarang Selatan
- 10) Kecamatan Semarang Barat
- 11) Kecamatan Semarang Utara
- 12) Kecamatan Genuk
- 13) Kecamatan Gunung Pati
- 14) Kecamatan Mijen
- 15) Kecamatan Tugu
- 16) Kecamatan Ngalian

c. Kekuasaan absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Semarang berdasar pada Pasal 10 UU No. 14 Bab I Pasal 2 jo. Bab III, Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara a) perkawinan, b) kewarisan, c) wakaf dan shodaqoh; dan juga di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁵

Dalam hal ini Pengadilan Agama dalam menangani perkara semakin bertambah, kalau terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut, harus diputuskan dahulu oleh pengadilan lingkungan peradilan umum.⁶ Secara lebih jelas, berikut ini akan dipaparkan mengenai kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

1) Perkara perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam UU mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai mana yang disebutkan dalam penjelasan dari Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Izin beristri lebih dari satu
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali dalam keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

⁵ *Amandemen UU Peradilan Agama NO.3 tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm18

⁶ Undang-Undang RI. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Darma Bakti 1989, hlm 74 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 pasal 49.

- c) Dispensasi nikah
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah
- f) Pembatalan nikah
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h) Perceraian karena talaq.
- i) Gugatan perceraian.
- j) Penyelesaian harta bersama.
- k) Penguasaan anak-anak.
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali.
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut.
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal kedua orang tuanya.

- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di tanah kekuasaanya.
 - t) Penetapan asal usul seorang anak.
 - u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
 - v) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.⁷
- 2) Perkara kewarisan, wasiat, dan *hibah*

Bidang kewarisan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.⁸ Adapun tentang wasiat dan *hibah* tidak dijelaskan secara rinci, hanya yang perlu dijelaskan disini bahwa wasiat harta wasiat itu telah dibuat saat si pembuat wasiat masih hidup, tetapi berlakunya setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Sedangkan *hibah* tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang sebab *hibah* itu dibuat sewaktu pemberi *hibah* masih hidup, dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima *hibah* sewaktu pemberi *hibah* masih hidup. Masalah mengenai waris, wasiat, dan *hibah* diatur

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hlm 10-11.

⁸ *Ibid.*

dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II dengan kualifikasi masalah waris diatur dalam pasal 117-193, masalah wasiat pasal 194-209, dan masalah hibah pasal 210-214.⁹

3) Perkara wakaf dan shodaqoh

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan shodaqoh adalah memberikan benda atau barang (bergerak/tetap) yang segera habis bila dipakai ataupun tidak kepada orang lain atau badan hukum tanpa imbalan dan tanpa syarat melainkan semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT.¹⁰

4) Perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah

Di dalam Amandemen UU No. 3 Tahun 2006 ditambah dengan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang memiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.

¹⁰ Roikhan Rashyd, *op.cit.*, hlm 38.

Sedangkan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT. Sedangkan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi: bank syari'ah, asuransi syaria'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah.¹¹

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka hukum acara Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum dan juga hukum khusus, yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang diatur dengan undang-undang yaitu:

- a. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agam
- b. UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- d. UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

¹¹ Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006, *op.cit.*, hlm 31-32

- e. Inpres No. 14 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung

- h. Peraturan Menteri Agama
 - i. Keputusan Menteri Agama
 - j. Yurisprudensi Mahkamah Agung¹²
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Setiap organisasi ataupun lembaga memiliki susunan kepengurusan yang bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang organisasi atau kelembagaan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam organisasi kelembagaan Pengadilan Agama Kota Semarang. Kepengurusan dalam Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

Ketua

¹² Muktiarto *op.cit.*, hlm 12.

**B. Proses Penunjukan dan Pengangkatan *Hakam* dalam Putusan Sela
Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm**

1. Deskripsi Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm

Penjelasan mengenai perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm meliputi tiga aspek yakni pihak-pihak yang berperkara, alasan timbulnya perkara dan gugatan yang diajukan, proses dan hasil pemeriksaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang berperkara

Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Rosana Kartika Sari binti T. Suprpto

Alamat : Perumahan Mijen Permai Blok C-95/96 Rt. 06 Rw. 07
Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Pihak yang digugat oleh Penggugat adalah suaminya dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ibnu Kusuma Jauhar Fikri, S.H., M.Hum bin Drs. H.
Kusdjono

Alamat : Perumahan Mijen Permai Blok C-95/96 Rt. 06 Rw. 07
Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pekerjaan : Swasta

Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

- b. Alasan timbulnya perkara (Posita) dan gugatan yang diajukan (Petitum)

Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm berasal dari pihak istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan teman SMA-nya
- 2) Kurangnya nafkah lahir dari Tergugat

Oleh karena itu pihak Penggugat mengajukan gugatan (petitum) sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat atas penggugat
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum

- c. Proses dan hasil pemeriksaan

Proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim PA Semarang dengan menghadirkan bukti yang meliputi:

- 1) Bukti Surat
 - a) Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 45/3/II/2002 tanggal 01 Februari 2002 KUA Kecamatan Mijen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, tertanda P.1
 - b) Foto Copy surat pernyataan dari Trixie Yanivera Wisari tertanggal 9 Agustus 2006 yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya yang dibantah oleh Tergugat, tertanda P.2

2) Bukti Saksi

- a) T. Suprpto bin Suparto (ayah kandung Penggugat)
- b) Siti Muthmainah binti H. Solchan (ibu kandung Tergugat)

Bukti surat yang diterima hanya bukti surat Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 45/3/II/2002 tanggal 01 Februari 2002 KUA Kecamatan Mijen, sedangkan bukti Foto Copy surat pernyataan dari Trixie Yanivera Wisari tertanggal 9 Agustus 2006 yang telah bermaterai cukup ditolak karena tidak ada aslinya. Sedangkan pada bukti saksi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat.

Hasil dari pemeriksaan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya masalah yang sedang dihadapi Penggugat dan Tergugat adalah perkara syiqaq. Oleh sebab itu, Majelis Hakim kemudian menghentikan persidangan dan mengeluarkan Putusan Sela dan mengangkat *hakam* dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

2. Proses Penunjukan *Hakam* dalam Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm

Pada dasarnya, proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* di Pengadilan Agama Kota Semarang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

“Dalam kedua UU tersebut, ada dua hal penting yang menjadi landasan bagi Hakim dalam menangani masalah syiqaq. Pertama adalah waktu pengangkatan *hakam*, yakni pada saat setelah adanya proses pembuktian. Kedua adalah tentang pihak yang dapat ditunjuk dan diangkat menjadi *hakam*, yakni dari pihak keluarga maupun dari pihak di luar keluarga yang bersengketa.”¹³

Proses pengangkatan *Hakam* yang dilakukan oleh Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang meliputi bukti surat dan bukti saksi.
- b. Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan bahwa perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm adalah perkara syiqaq.
- c. Majelis Hakim menunda persidangan dan mengeluarkan Putusan Sela dengan nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm untuk mengangkat *Hakam* dari kedua belah pihak.
- d. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengangkat *Hakam* adalah:
 - 1) Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974
 - 2) Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006
 - 3) Q.S. an-Nisa’ ayat 35
- e. *Hakam* dari kedua belah pihak adalah:

¹³ Wawancara dengan Bapak Sarwohadi, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm, tanggal 3 Juni 2008

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sarwohadi, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm, tanggal 3 Juni 2008 dan juga terdapat dalam Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm kecuali dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengangkat hakam.

- 1) T. Suprpto bin Suparto (ayah kandung Penggugat) sebagai *hakam* dari pihak Penggugat
 - 2) Siti Muthmainah binti H. Solchan (ibu kandung Tergugat) sebagai *hakam* dari pihak Tergugat
- f. Memberikan tugas (memerintahkan) kepada para *hakam* untuk melakukan usaha perdamaian di antara kedua belah pihak sejak tanggal 5 Desember 2006 hingga 17 Desember 2006 untuk kemudian dilaporkan pada sidang lanjutan pada tanggal 18 Desember 2006

C. Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm

Isi dari Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Mengangkat T. SUPRAPTO bin SUPARTO sebagai Hakam dari Penggugat dan SITI MUTMAINAH binti H. SOLCHAN sebagai Hakam dari Tergugat;
2. Memerintahkan kepada para Hakam dari kedua belah pihak untuk mendamaikan / mencari jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat;.....
3. Memerintahkan kepada para Hakam dari kedua belah pihak melaporkan hasil usahanya kepada Majelis Hakim pada

persidangan yang akan datang tanggal 18 Desember 2006;.....

4. Menangguhkan keputusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;.....

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1427 H oleh kami H. SARWOHADI S.H sebagai Ketua Majelis, MOH. ICHWAN S.H dan DRS H. ALI IMRON S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan AGUSTINI ICHTIYARSIH, B.A sebagai Panitera Pengganti, Putusan Sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MOH. ICHWAN, S.H

H. SARWOHADI, S.H

DRS. H. ALI IMRON, S.H

Panitera Pengganti

AGUSTINI ICHTIYARSIH, B.A

Selanjutnya setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan

ini ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember 2006 pukul 09.00 WIB, untuk mendengarkan laporan hakim;

Dengan perintah kepada:

Penggugat dan Tergugat dan kedua hakim supaya datang di persidangan pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dengan tanpa dipanggil lagi, perintah tersebut berlaku sebagai panggilan resmi pengadilan.

Setelah penundaan tersebut oleh Ketua Majelis diumumkan, kemudian Ketua Majelis menutup persidangan perkara ini;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

AGUSTINI ICHTIYARSIH, B.A

H. SARWOHADI, S.H

BAB IV

ANALISIS PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKAM PADA

PUTUSAN SELA NOMOR 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum

Meski tidak tertuang dalam Putusan Sela, setelah penulis menemui dan melakukan wawancara, Ketua Majelis Hakim menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengangkatan hakam pada perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm. Menurut Bapak **Sarwohadi**, ada tiga (3) dasar pertimbangan hukum yakni:¹

1. Surat an-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan bahwa hakam ditunjuk dari keluarga kedua belah pihak.
2. Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan dan membolehkan bahwa hakam dapat ditunjuk dari keluarga pihak yang berselisih.

Sedangkan mengenai pendapat pihak Tergugat yang menganggap bahwasanya ayah kandung Penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab atas munculnya surat gugatan cerai dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu adalah hal yang biasa dalam sebuah proses penyelesaian masalah.

¹ Wawancara dengan Bapak Sarwohadi, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm, tanggal 3 Juni 2008

Pada lingkup hukum perundang-undangan Republik Indonesia disebutkan bahwasanya dalam setiap keputusannya, Majelis Hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil dan menetapkan sebuah putusan. Apabila hal ini diabaikan, maka secara otomatis, putusan yang telah diambil dan ditetapkan mengalami cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Pada Putusan Sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim secara legal formal tidak menyalahi aturan perundang-undangan Indonesia. Menjadikan surat an-Nisa' ayat 35 sebagai dasar pertimbangan adalah salah satu bentuk ketaatan hukum pada konteks keagamaan. Sedangkan penggunaan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan bentuk ketaatan hukum pada konteks kenegaraan. Akan tetapi jika mengacu pada hakekat tujuan dan tugas hakam, maka dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim belum dan atau kurang maksimal.

Kekurangmaksimalan putusan hakim dalam pengangkatan hakam terletak pada adanya kontraproduktif yang terdapat pada diri hakam dari pihak Penggugat. Jika dikembalikan pada keterangan yang diberikan oleh pihak Tergugat, maka ayah kandung Penggugat tidak layak menjadi hakam karena tidak memiliki keinginan untuk mendamaikan dan bahkan cenderung berkeinginan memisahkan anaknya (pihak Penggugat) dengan suaminya (pihak Tergugat). Idealnya Majelis Hakim menyelidiki terlebih dahulu perihal keterangan yang diberikan oleh pihak Tergugat berkaitan dengan adanya

dugaan turut campurnya orang tua pihak Penggugat (ayah kandung Penggugat). Apabila dugaan tersebut salah, maka Majelis Hakim – dengan pertimbangannya – boleh mengangkat ayah kandung Penggugat menjadi hakim. Tetapi jika dugaan dari pihak Tergugat tersebut benar adanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mengangkat ayah kandung Penggugat untuk menjadi hakim dan Majelis Hakim berhak meminta ganti hakim lain atau memberikan saran untuk menggunakan hakim dari luar lingkungan keluarga pihak Penggugat apabila memang sudah tidak ada hakim yang dianggap layak. Hal tersebut dilakukan demi terpenuhinya syarat seseorang menjadi hakim sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa hakim haruslah memiliki kecakapan, kejujuran, kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh pihak yang berperkara.² Oleh sebab itu pemilihan hakim dari luar keluarga pihak yang berselisih dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat hakim dalam diri orang yang akan diangkat menjadi hakim.

Padahal jika mengacu dan memadukan substansi dasar pertimbangan dengan keadaan yang terjadi terdapat garis hubungan yang dapat dijadikan pijakan Majelis Hakim dalam menentukan pihak yang berhak menjadi hakim, khususnya UU Nomor 7 Tahun 1989. Pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan tentang kebolehan hakim yang berasal dari luar pihak keluarga. Secara tidak langsung, UU Nomor 7 Tahun 1989 ini mengindikasikan bahwasanya apabila tidak ada orang dari keluarga pihak

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990, hlm. 274.

yang berselisih, maka diperkenankan untuk mengangkat hakim dari luar keluarga pihak yang bertikai.

Pengangkatan hakim dari luar keluarga pihak yang berselisih tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Syihabuddin Mahmud hakim dari keluarga memang lebih dianjurkan, tetapi bukan berarti suatu keharusan.³ Selain itu, jika ditinjau dari pendapat Abu Kasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari yang menyatakan bahwa hakim harus berasal dari keluarga masing-masing pihak yang berselisih. Maka tetap saja apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim kurang maksimal karena kurang terpenuhinya syarat hakim. Secara lebih jelasnya, Abu Kasim memberikan empat kriteria bagi hakim keluarga, yakni:⁴

1. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami-istri secara mendalam dan mendekati kebenaran
2. Keluarga kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat menginginkan perdamaian kedua belah pihak
3. Merekalah yang lebih dipercaya oleh suami-istri
4. Suami-istri yang berselisih akan lebih leluasa dan terbuka dalam bercerita kepada keluarga sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwasanya Majelis Hakim belum dan atau tidak maksimal dalam mempergunakan dasar hukum sebagai bahan pertimbangan karena tidak memadukan antara keadaan yang terjadi dalam proses pembuktian dengan

³ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1708-1709

⁴ *Ibid.*, hlm. 1709.

substansi hukum perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam setiap tindakan hukum.

B. Tinjauan Hukum Formal terhadap Penunjukan dan Pengangkatan Hakam pada Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm

Terdapat dua hal penting berkenaan dengan hakam dalam proses penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama. *Pertama* adalah berkaitan dengan prosedur penunjukan hakam yang pembahasannya meliputi pihak-pihak yang berhak menunjuk hakam dan pihak yang berhak menjadi hakam. *Kedua* adalah perihal legal formal yang menguatkan pengangkatan hakam atau disebut dengan Putusan Sela. Oleh karena itu, pembahasan dalam analisis ini akan penulis paparkan dalam dua sub bahasan yang berhubungan dengan hal yang telah tersebut sebelumnya sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Formal Prosedur Pengangkatan Hakam

Ketentuan prosedur pengangkatan hakam diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 76 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.

UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut mengandung tiga hal penting yakni *pertama*, tentang waktu penunjukan hakam di mana dijelaskan bahwa penunjukan dan pengangkatan *hakam* dilaksanakan setelah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami-istri)

yang berselisih.⁵ Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut dan dipandang masih berpeluang untuk didamaikan, maka Hakim berhak meminta kepada pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang untuk menjadi *hakam*, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarganya.⁶ *Kedua*, tentang jumlah orang yang dapat ditunjuk menjadi hakam di mana dijelaskan bahwa hakam dapat terdiri dari satu orang atau lebih. *Ketiga*, tentang asal hakam di mana dijelaskan bahwa hakam dapat berasal dari keluarga pihak-pihak yang berselisih (berperkara) dan atau berasal dari luar keluarga pihak-pihak yang berselisih (berperkara).

Berkaitan dengan waktu penunjukan, menurut penulis, tidak terdapat masalah karena penunjukan dan pengangkatan hakam dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yakni dilaksanakan setelah adanya upaya pembuktian dan terdapat peluang untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Dalam hal jumlah juga tidak terdapat permasalahan karena hakam yang ditunjuk merupakan wakil dari masing-masing pihak yang berperkara dengan masing-masing satu orang hakam.

Sedangkan pada masalah asal hakam, proses penunjukan hakam, menurut penulis kurang memiliki kesesuaian. Seperti telah disebutkan bahwa dalam perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm proses penunjukan hakam tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara melainkan

⁵ Dijelaskan dalam M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 273.

⁶ Dijelaskan dalam *Ibid.*, hlm. 274. Lihat juga dalam Abdul Manan, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 394.

dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak langsung. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada kedua orang tua dari pihak berperkara mengenai kesediaan mereka untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim mengangkat kedua orang tua pihak-pihak yang berperkara menjadi hakam dan dikuatkan dengan Putusan Sela dengan nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.⁷

Penunjukan hakam yang dilakukan oleh Majelis Hakim bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam karena sebagian ulama Islam juga menyebutkan tentang hak dari hakim sebagai wakil pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat hakam. Secara lebih jelasnya, penunjukan hakam yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada perkara syiqaq dengan nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm sesuai dan berdasar pada pendapat kelompok Mazhab Maliki, sebagian pengikut Hanbali, qaul jadid Imam Syafi'i, asy-Sya'bi, dan Ibnu Abbas.⁸ Tetapi jika mengacu pada pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim sebagai hakam, maka akan timbul sebuah permasalahan di mana hakam dari pihak Penggugat (ayah kandung Penggugat) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, pada saat pembuktian berlangsung dianggap oleh Tergugat sebagai pihak yang mendorong Penggugat untuk melakukan pengajuan gugatan cerai.

⁷ Salinan Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.

⁸ Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di mana kelompok yang tersebut di atas merupakan kelompok yang membolehkan Majelis Hakim sebagai wakil pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat hakam. Sedangkan kelompok yang menyatakan bahwa hakam harus ditunjuk oleh keluarga adalah Mazhab Hanafi, qaul qadim Imam Syafi'i, sebagian pengikut Hanbali, dan at-Tabrari. Lihat Slamet Abidin, dkk., Slamet Abidin, dkk., *Fiqih Munakahat I*, hlm. 190; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

Menurut penulis, sebelum mengangkat ayah kandung Penggugat sebagai hakam seharusnya Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu permasalahan yang disampaikan oleh pihak Tergugat terkait dengan ikut campurnya ayah kandung Penggugat sehingga terjadinya proses perceraian tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa *hakam* yang ditunjuk harus disertai dengan biodata dan keterangan mengenai diri *hakam*. Hakim kemudian memeriksa kelayakan diri dari *hakam* yang telah ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Namun apabila Hakim merasa bahwa *hakam* tidak layak, maka pihak yang berselisih harus menunjuk lagi *hakam* dari pihaknya.⁹

Pernyataan tersebut di atas sangat jelas menegaskan bahwa Majelis Hakim sebelum mengangkat seseorang menjadi hakam terlebih dahulu harus memeriksa calon hakam. Oleh sebab itulah maka penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mengabaikan keterangan yang diberikan oleh Tergugat pada saat pembuktian tentang keikutcampurannya ayah kandung Penggugat dalam pengajuan gugatan cerai. Dengan diabaikannya keterangan yang diberikan oleh pihak Tergugat, maka secara tidak langsung Majelis Hakim telah menghilangkan prosedur penunjukan dan pengangkatan hakam. Memang pada pernyataan di atas juga menerangkan tentang kewenangan asumsi dari Majelis Hakim berkaitan dengan kelayakan dan atau ketidaklayakan calon hakam. Akan tetapi, menurut penulis, tetap saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan

⁹ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 274-275.

apabila hak kewenangan asumsi tersebut digunakan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan karena hak kewenangan tersebut baru dapat digunakan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap calon hakim.

Ketiadaan proses pemeriksaan terhadap calon hakim akan dapat mengaburkan pemenuhan syarat oleh hakim. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim di antaranya adalah:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Adil
- d. Arif
- e. Disegani oleh kedua belah pihak (suami istri)
- f. Berniat melakukan perdamaian dengan ikhlas
- g. Muslim¹⁰

Dengan ditiadakannya pemeriksaan terhadap keterangan yang diberikan oleh Tergugat tentang ayah kandung Penggugat yang dijadikan hakim, maka secara tidak langsung juga berdampak pada tipisnya peluang untuk menciptakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut penulis, dengan adanya asumsi dari Tergugat, hakim dari Penggugat sangat tidak mungkin untuk melakukan perdamaian karena telah memiliki rasa tidak senang terhadap Tergugat dan berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat. Hal itu terbukti dengan gagalnya

¹⁰ Syarat ini penulis sarikan dari tiga pendapat tokoh berkaitan dengan syarat hakim yakni Yahya Harahap, Abdul Manan, dan Slamet Abidin.

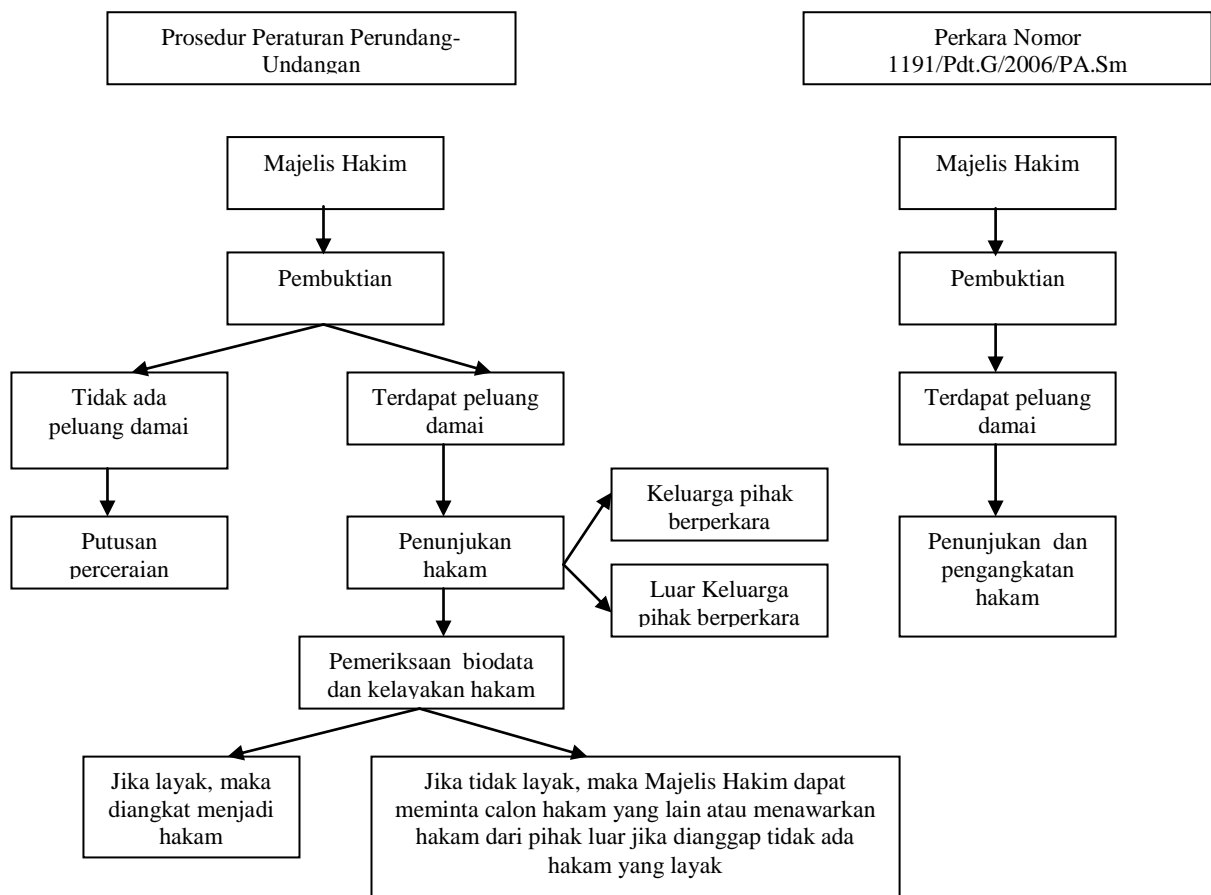
usaha perdamaian dengan keluarnya Putusan Akhir Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm yang memisahkan Penggugat dan Tergugat dengan putusan Talak Ba'in.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya penunjukan dan pengangkatan hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan prosedur hukum penunjukan dan pengangkatan hakim karena tidak adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap calon hakim.

Bagan Perbandingan Prosedur Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Pada Perkara No.

1191/Pdt.G/2006/PA.Sm di Pengadilan Agama Kota Semarang



2. Tinjauan Hukum Formal Putusan Sela

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 60 disebutkan ada dua putusan hasil produk pemeriksaan hakim dalam persidangan, yakni Penetapan dan Putusan. Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*), sedangkan Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (*kontentius*).

Berkaitan dengan putusan, sebuah Putusan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- a. Dibuat secara tertulis
- b. Ditandatangani sebagai dokumen resmi
- c. Terdiri dari empat bagian, yakni:
 - 1) Kepala Putusan
 - 2) Identitas para pihak
 - 3) Pertimbangan (*konsideran*) yang memuat tentang “duduk perkara” dan “pertimbangan hukum”
 - 4) Amar dan diktum putusan

Syarat-syarat tersebut di atas harus terpenuhi oleh sebuah Putusan. Apabila salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka sebuah Putusan akan batal dan tidak wajib dilaksanakan demi hukum.

¹¹ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 262.

Berdasarkan pada ketentuan terhadap sebuah putusan dan kaitannya dengan Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm, maka dapat diketahui bahwasanya dalam Putusan Sela tersebut kurang memenuhi syarat sebuah putusan yakni tentang dasar pertimbangan.

Pada Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm, Majelis Hakim hanya menyertakan dasar pertimbangan mengenai duduk perkara saja dan tidak menyertakan dasar pertimbangan mengenai pertimbangan hukumnya. Dengan tidak adanya penyertaan dasar pertimbangan hukum, maka Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm dapat dikatakan sebagai putusan cacat hukum. Meskipun dalam Putusan Akhir terdapat dasar pertimbangan hukum, hal itu tidak dapat memberikan status sah menurut hukum kepada Putusan Sela karena isi dan tujuan kedua putusan tersebut adalah berbeda.

Meski sebenarnya Putusan Sela tidak dapat berdiri sendiri karena menjadi bagian dari (lahirnya) Putusan Akhir bukan berarti dasar pertimbangan hukum Putusan Sela dapat ditiadakan. Hal ini penulis dasarkan pada penjelasan Mukti Arto yang menyebutkan bahwa isi dan susunan dari Putusan Sela ditulis seperti pada putusan pada umumnya.¹² Selain karena prosedur penulisan, sebuah putusan dalam proses persidangan tidak boleh diputuskan tanpa adanya dasar pertimbangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh sebab itu, maka

¹² *Ibid.*

seharusnya dalam Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm terdapat dasar pertimbangan hukum.

Dengan ketiadaan dasar pertimbangan hukum yang menyebabkan adanya kecacatan dari lingkup hukum sekaligus menjadi penegas tidak wajibnya pelaksanaan putusan, maka secara tidak langsung proses perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm adalah batal demi hukum karena penunjukan, pengangkatan, tugas, dan laporan hakam yang diangkat melalui putusan sela tidak dilengkapi dengan pencantuman dasar pertimbangan hukumnya. Meskipun dalam wawancara yang penulis laksanakan, Bapak Sarwohadi menyebutkan ada dasar pertimbangan hukum dalam perkara tersebut, hal itu tidak dapat menguatkan Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/P.Sm karena peraturan menyebutkan bahwa sebuah putusan yang berarti juga mengenai dasar pertimbangan hukumnya harus dibuat secara tertulis dan bukan secara lisan (ucapan). Adapun mengenai dasar pertimbangan pada Putusan Akhir tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Putusan Sela karena tujuannya berbeda. Pada Putusan Sela, dasar pertimbangan hukum digunakan untuk mengangkat hakam sedangkan pada Putusan Akhir dasar pertimbangan hukum berhubungan dengan landasan pengambilan dan penetapan putusan dari sebuah persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm adalah: a) Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974; b) Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006; c) Q.S an-Nisa' ayat 35. Dalam penggunaan dasar pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim kurang maksimal karena tidak menjadikan isi keseluruhan dasar pertimbangan hokum dalam penunjukan dan pengangkatan hakam, khususnya mengenai kelayakan pihak yang diangkat menjadi *hakam*.
2. Secara hukum formal, proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan dasar hukum yaitu: Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.

Meskipun demikian, pada Putusan Sela Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm. terjadi tingkat subyektifitas dari *hakam* karena hakim tetap saja mengangkat ayah kandung penggugat untuk menjadi *hakam*.

B. Saran

Dengan adanya proses penelitian ini, penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin memberikan beberapa saran kepada Pengadilan Agama Semarang, khususnya terkait dengan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Majelis Hakim lebih maksimal dalam menggunakan dasar hukum yang disesuaikan antara keadaan yang terjadi dalam proses pembuktian dengan substansi hukum perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam setiap tindakan hukum.
3. Sebagai insan penegak hukum, Majelis Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan putusannya yang menghindari subyektifitas dalam mengangkat *hakam*.

B. Penutup

Demikianlah pemaparan hasil penelitian penulis. Berpijak pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun sehingga mampu menjadi cermin dalam memperbaiki karya ini serta sebagai ilmu bagi penulis dalam jenjang penulisan di masa depan.

Akhirnya, dengan mengharap ridla Allah, semoga di balik kekurangan dan keterbatasannya, karya ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abidin, Slamet dkk., *Fiqih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Hadi Mufaat, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang : Duta Grafika, 1992.
- Arto, A. Mukti, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pembuktian di Pengadilan Agama*, Cet. Ke 4, Bandung : Pustaka Pelajar, 2005.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* jilid 1, Cet. Ke 24, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Harahab, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Garuda Metro Politan Press, 1990.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mujieb, M Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1985.
- Ningrat, Koenjoro, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1991.

Putusan Sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm.

Rashyid, Raikhan, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun*, Jakarta : Pustaka Amini, 1989.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung : Armico, 1984.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung : Alumni, 1993.

Syaltut, Mahmud, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar BaruVan Hoeve, 1997.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta : Darma Bakti, 1989.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : PT. Hadikarya Agung, 1096.